RENCANA KERJA TAHUN 2026
(RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA GORONTALO
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan SKPD khususnya dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal disusun.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ini, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kota Gorontalo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) yang telah disusun ini diharapkan diikuti dengan tindaklanjut berupa pelaksanaan, komitmen dan motivasi yang tinggi melaksanakan rencana yang telah tersusun ini. Harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran – sasaran pembangunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Gorontalo, 29 Agustus 2025

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO,

MOHAMMAD MULKY DATAU, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19830521 200112 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPP TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 36

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 48

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 50

3.3 Program dan Kegiatan 51

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN 56

BAB V. PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

TC . 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 BKPP Kota Gorontalo 10
Tabel 2.2 Analisis Capaian Kinerja Untuk Sasaran Strategis 19
Tabel 2.3 Pengukuran Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 19
Tabel 2.5 Data ASN yang mengikuti Tugas Belajar Tahun 2024 20
Tabel 2.6 Data ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2024 berdasarkan aplikasi SiERIK 26
Tabel 2.8 Data Hukuman Disiplin Tahun 2024 27
Tabel 2.9 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Tahun 2022 sampai dengan 2024 29
Tabel 2.10 Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran Strategis 30
Tabel 2.11 Data Capaian Unsur Pelayanan 31
Tabel 3.2.1.12 Data Layanan Pengurusan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan ... 32
Tabel 2.14 Bobot/Skala Penilaian Kinerja 32
Tabel TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kota Gorontalo 35
Tabel TC 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Gorontalo Tahun 2026 39
Tabel Sasaran, Indikator, Target BKPP Kota Gorontalo 50
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 52
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan BKPP 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

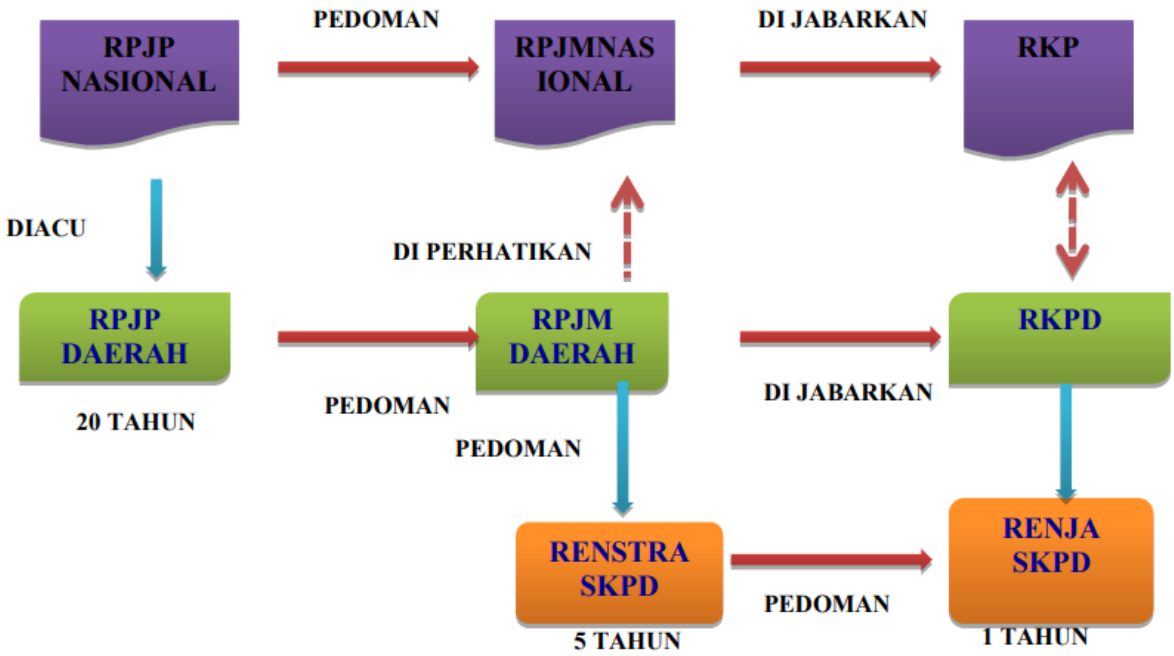
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Gorontalo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun Pertama Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun

2025-2026 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2025-2026 dari Rencana Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025-2026.

Berikut Kami sajikan baga keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumern perencanaan pembangunan lainnya :

KETERKAITAN RENJA OPD
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024;
j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Tahun 2026. Secara rinci maksud dari penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen dalam melaksanakanprogram dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan untuk Anggaran Tahun 2026 guna membangun kinerja yang lebih akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2026 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester 1 Tahun Anggaran 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk menyusun Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Kepegawaian Tahun 2026 diperlukan hasil capaian tahun 2024, hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) program prioritas dan 1 (satu) program pendukung yang terurai dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 31 sub kegiatan. Pagu anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD murni sejumlah Rp. 7.831.484.589 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh satu empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan yang ada mengalami perubahan anggaran yang tertuang dalam DPPA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Rp. 8.031.069.889 (delapan Milyar tiga puluh satu juta enam puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah). Adapun capaian kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 107% dan serapan anggaran dari pelaksanaan Renja tahun 2024 ini sebesar 87% yang didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

dengan indikator : Persentase pemenuhan layanan urusan penunjang pemerintah daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
   c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
   b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah

dengan indikator : - Persentase ASN berkinerja baik berdasarkan penilaian prerstasi kerja

- *Persentase pengangkatan ASN dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi*
- *Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu*

1. Kegiatan Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
   a) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan CPNS dan PPPK.
   b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
   c) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
   d) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
   e) Pengelolaan Data Kepegawaian
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
   a) Pengelolaan Mutasi ASN
   b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
   c) Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan kompetensi ASN
   a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
b) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

dengan indikator : Persentase ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.
   a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja dari 30 sub kegiatan diatas hanya 3 sub kegiatan yang memperoleh capaian dibawah 80%. Ada beberapa sub kegiatan yang tercapai sesuai target, ada yang melebihi target dan ada pula yang kurang dari target. Sub kegiatan tersebut diantaranya :

1. Sub Kegiatan yang telah memenuhi capaian target kinerja adalah :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan CPNS dan PPPK.

- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

2. Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target
   - Pengelolaan Mutasi ASN
   - Pengelolaan Promosi ASN
   - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
   - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari sub kegiatan diatas :

1. belum adanya rekomendasi dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sehingga anggaran honorarium Tim Pansel dan Jasa Tim Asesor BKN tidak dapat direalisasikan secara optimal.
2. belum adanya ijin untuk PPK melaksakan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan struktural dan juga kegiatan rapat Tim Penilai kinerja yang hanya dilaksanakan sebanyak 5 kali
3. adanya perubahan regulasi terkait system pelaksanaan ujian dinas sehingga tidak dapat dilaksanakan akan tetapi kegiatan evaluasi pengembangan kompetensi ASN tetap dilaksanakan yakni dengan mengeluarkan rekomendasi kegiatan pengembangan kompetensi kepada ASN atau OPD yang akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo selama Tahun 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian renstra OPD adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Thn 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja PD (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn Berjln (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra)%)
2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**100%**	**8 Dokumen**		
Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Dokumen					12 Dokumen		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen		
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1148 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	42 Orang/Bulan	42 Orang/Bulan	100%	574 Orang/Bulan		
Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen					1 Laporan		
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	**Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	100%		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Persentase Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**104%**	**100%**	**100%**	**94,00%**	**100%**		
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	31 Laporan	25 Laporan	17 Laporan	68,00%	12 Laporan		
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Presentase Pegadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**2 Unit**	**2 Unit**	**2 Unit**	**44%**	**100%**		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	2 Unit	16 Unit	7 Unit	44%	7 Unit		
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase BMD yang dipelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	7 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	7 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	-	-	-	1 Unit		
Pemelihraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	22 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**122%**				**90%**		
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	**Persentase ASN yang diangkat Berdasarkan formasi yang ditetapkan**	**100%**	**220%**	**100%**	**220%**	**100%**	**90%**		
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaam PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen		
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200 Dokumen	201 Dokumen	100 Dokumen	147 Dokumen	100%	100 Dokumen	-	-
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	4 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	-	-

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Doku men	100%	1 Dokumen	-	-
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	-	-
MUTASI DAN PROMOSI ASN	**Persentase Mutasi dan Promosi yang Diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	100%	2 Dokumen	-	-
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3500 Dokumen	1962 Dokumen	1500 Dokumen	2017 Dokumen	134%	1500 Dokumen	-	-
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	24 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	**Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi**	**100%**	**101%**	**100%**	**-**	**-**	**100%**		
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	300 Orang	316 Orang	80 Orang	-	-	300 Orang		
PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	**Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24 Dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 Dokumen		
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	6 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi**	**77.96%**	**66%**	**66.3%**	**60%**	**90%**	**77,96%**		
SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	**Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pengembangan Kom petensi manajerial dan fungsional**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	38 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	3 Laporan		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisisi kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK ssuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Namun pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewanangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indicator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi sera kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Kota Gorontalo, dan melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan tugasn dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo tersebut diatas, maka indikator kinerja berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1) Indeks Profesionalitas ASN
2) Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT
3) Nilai AKIP

4) Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti

Pengukuran capaian kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan reallisasi Indikator Kinerja Utama dan penjelasan dari capaian masing-masing IKU adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,kompetensi,kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kualitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai penilaian dan evaluasi tindak lanjut dalam upaya pengembangan profesionalisme Pegawai ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan rumus sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Pengukuran IP ASN meliputi 4 Dimensi dengan Bobot masing – masing dimensi adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi memiliki bobot 25%
2. Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi memiliki bobot 40%
3. Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja memiliki bobot 30%
4. Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin memiliki bobot 5%

Hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 yang dilakukan terhadap 3881 pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2

Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran strategis

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Sumber daya Aparatur				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65	77.65	120%

Dengan nilai masing – masing dimensi sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

No	Dimensi	Bobot Per Dimensi	Capaian Tahun 2024	Capaian (%)
1	Kualifikasi	25	21.31	86
2	Kompetensi	40	27.12	68
3	Kinerja	30	24.23	80.77
4	Disiplin	5	5	100
Nilai Akhir		**100**	**77.65**	83.70

Berdasarkan data diatas indikator terlihat bahwa dari 4 (empat) dimensi penilaian indeks Profesionalitas ASN capaian dimensi kompetensi menjadi yang paling rendah. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2024 sebagian ASN belum melakukan pembaruan data terkait kompetensi yang mereka dapat dari berbagai pelatihan pengembangan diri pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dari Jumlah ASN 4232 Tahun 2024 hanya 3615 ASN yang berpartisipasi sehingga berdampak pada rendahnya Nilai IP ASN khususnya dimensi kompetensi dengan capaian 68%.

Dalam pencapaian indikator ini BKPP Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan selama Tahun 2024 yang direncanakan pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo antara lain :

a. Peningkatan Kualifikasi ASN melalui Pemberian Tugas Belajar

Untuk pencapaian nilai dimensi Kualifikasi, Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan ujian dinas dan penyesuaian ijasah kepada 19 Orang dan yang lulus dan memperoleh tugas belajar sebagai berikut :

Tabel 2.5

Data ASN yang mengikuti Tugas Belajar Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT /GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN/PROGRAM STUDI	INSTANSI
1	RITA HAMZAH PARAMANI, S.KOM	198306232010012000	PENATA, III/c	S2	PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO	KANTOR KELURAHAN WONGKADITI TIMUR
2	LAILA SANTI PIDU, S.PD	198201102014072001	PENATA, III/c	S2	PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	SDN NO. 66 KOTA TIMUR
3	LUKMAN LAISA, S.STP	198410032003121001	PEMBINA Tk. I, IV/b	S2	PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	KANTOR KECAMATAN SIPATANA

4	SRI NADYAWATI MOHAMAD,S.Akun.	198911112011012004	PENATA, III/c	S2	PENDIDIKAN STRATA DUA (S2) PRORAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
5	MANSUR,S.KOM	198205122015021001	PENATA, III/c	S2	PENDIDIKAN STRATA DUA (S2) PRORAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
6	ROFINDA FATMAWATY POLI, ST	198203272009012004	PENATA TK I, III/d	S2	PERPANAJANGN TUGAS BELAJAR PENDIDIKAN STARATA DUA (S2) MAGISTER MANAJEMEN PADA UNIVERSITAS GORONTALO	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GORONTALO
7	ADITYA EKA PUTRA UTAMA, S.Kep	199702202020121002	PENGATUR, II/c	PROFESI	PENDIDIKAN PROFESI NERS PADA FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	PUSKESMAS KOTA TIMUR

8	Ftr.NAZLI ALAMRI, SST.Ft	197301051999032012	PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	S2	PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN FISIOTERAPI PADA INSTITUT ILMU KESEHATAN (IIK) STRATA INDONESIA	RSUD PROF ALISABU
9	SRI LEILA DJAFAR A.Md. Kep	198710242011012002	PENATA , III/c	S1	PENDIDIKAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) KEPERAWATAN PADA STIKES AMANAH MAKASAR	RSUD PROF ALISABU
10	dr. MARK BELFIS WICAKSONO HARSONO	199403162020121004	PENATA MUDA TINGKAT I,III/b		PENDIDIKAN DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA FAKULTAS KEDOKTERAN PADA UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA	RSUD PROF ALISABU
11	L.M ZULKARNAIN, S.Pd	197610032006041014	PEMBINA Tk. I, IV/b	S2	PENDIDIKAN STRATA DUA (S2) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	SMP NEGERI 11 KOTA GORONTALO

12	VIVI SURYANINGSIH SURATMAN, A.Md.Kep	199402272020122003	PENGATUR, II/c	S1	PENDIDIKAN SARJANA PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	RSUD OTANAHA KOTA GORONTALO
13	RONI MOHAMAD A.R PATILIMA, A.Md.Kep	198507152011011004	PENATA Tk.I, III/d	S1	PENDIDIKAN STARATA SATU (S1) KEPERAWATAN PADA FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	RSUD ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
14	JUFRI PUHI, S.IP	198007292010011001	PENATA MUDA Tk.I, III/b	S2	PENDIDIKAN STRATA DUA (S2) PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI PADA PASCA SARJANA UNIVERSITAS GORONTALO	KECAMATAN KOTA UTARA
15	RONAL IDRUS, SE	198603272009011002	PENATA, III/c	S2	PENDIDIKAN STRATA DUA (S2) PRORAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS GORONTALO	BADAN KEUANGAN

16	ADE YUSRIYANTI CONO, SE	198103212006042010	PEMBINA, IV/a	S2	PENDIDIKAN STRATA DUA (S2) PRORAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS GORONTALO	BADAN KEUANGAN
17	DEWI CYINTHIA DEU, SE	197612132009012000	PENATA Tk.I, III/d	S2	PENDIDIKAN STRATA DUA (S2) PRORAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS GORONTALO	BADAN KEUANGAN
18	LIA SURYANI DAMA, SE	199001022015022002	PENATA, III/c	S2	PENDIDIKAN STRATA DUA (S2) PRORAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS GORONTALO	BADAN KEUANGAN
19	NURHAYATI ABDULLAH, S.ST,M.AP	198612152005012002	PEMBINA, IV/a	S3	PENDIDIKAN DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK

b. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi berupa pengembangan kompetensi teknis dan manajerial bagi ASN, baik fasilitasi, pengiriman maupun penyelenggaraan melalui Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Diklat Penjenjangan ASN melalui program pengembangan sumber daya manusia antara lain :

1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator

   Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah pelatihan struktural kepemimpinan yang bertujuan untuk mengembangkankompetensi manajerialpeserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator.

   Tahun 2024 BKPP Kota Gorontalo mengirim utusan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan jumlah 1 (satu) orang yang diselenggarakan oleh PPSDM Kemendagri Regional Makasar dengan waktu 91 hari pelatihan 797 JP (31 hari pelatihan bertempat ditempat penyelenggaraan PKA atau 290 JP dan 60 hari pelatihan bertempat di instansi asal peserta atau 540 JP)

2. Orientasi PPPK

   Pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah proses pengenalan dan pemahaman tentang tugas, tanggungjawab dan hak – hak sebagai PPPK. Tahun 2024 Kota Gorontalo melaksanakan persiapan sejumlah 153 Orang PPPK untuk mengikuti MOOC (Massive Open Online Course) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan PPPK dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta membantu PPPK dalam memahami dan mengikuti kebijakan peraturan yang berlaku, orientasi PPPK dengan MOOC berlangsung selama 15 hari kerja dengan jumlah Jam Pelajaran 45 JP.

3. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop bagi ASN yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo baik secara daring maupun luring

   Berikut dapat dilihat kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Kerja BKPP Tahun 2024 dan juga ASN dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang memperoleh pengembangan kompetensi yang dilaporkan melalui aplikasi SIERIK pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Data ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2024 berdasarkan aplikasi SiErik

NO	PERANGKAT DAERAH	JML ASN	JML ASN YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	42	28
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22	8
3	BADAN KEUANGAN	72	58
4	BADAN LAYANAN UMUM RSUD. Prof. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO	471	20
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21	17
6	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	46	30
7	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	19	9
8	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	71	37
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	28	11
10	DINAS KESEHATAN	645	346
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	27	20
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	43	15
13	DINAS PANGAN	28	8
14	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	30	6
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68	13
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	34	18
17	DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO	1643	99
18	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA GORONTALO	22	
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27	12
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	33	10
21	DINAS PERHUBUNGAN	40	13
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	24	11
23	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	31	6
24	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	37	16
25	INSPEKTORAT	57	28
26	KANTOR KECAMATAN DUMBO RAYA	47	14
27	KANTOR KECAMATAN DUNGINGI	47	16
28	KANTOR KECAMATAN HULONTHALANGI	45	22
29	KANTOR KECAMATAN KOTA BARAT	61	22
30	KANTOR KECAMATAN KOTA SELATAN	51	21

31	KANTOR KECAMATAN KOTA TENGAH	53	24
32	KANTOR KECAMATAN KOTA TIMUR	46	18
33	KANTOR KECAMATAN KOTA UTARA	49	29
34	KANTOR KECAMATAN SIPATANA	46	18
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	73	6
36	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO	107	88
37	SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO	26	27
JUMLAH		**4232**	**1144**

c. Penegakan serta Peningkatan disiplin dan kinerja PNS Kota Gorontalo.

- Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

  Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan fungsional. Dasar penetapan besaran TPP berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, parameter pemberian TPP yakni parameter berdasarkan Prestasi kerja.
- Pemberian TPP ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo
- Penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

  Berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara di instansi Pemerintah Kota Gorontalo dilakukan secara terus menerus. Pada Tahun 2024 jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan berjumlah 6 kasus yang terdiri dari 1 jenis hukuman disiplin seperti tergambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8

Data Hukuman Disiplin Tahun 2024

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TAHUN
		2024
A	**RINGAN**	
1	Teguran Lisan	-
2	Teguran Tertulis	-
3	Pernyataan Tidak Puas secara tertulis	-

Jumlah Hukuman Disiplin Ringan		**0 Orang**
B	**SEDANG**	
1	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	-
2	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	-
3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	-
Jumlah Hukuman Sedang		**0 Orang**
C	**BERAT**	
1	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	-
2	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	-
3	Pembebasan dari jabatan	-
4	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	3 Orang
5	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	3 Orang
Jumlah Hukuman Berat		**6 Orang**
Total Per Tahun		**6 Orang**
Jumlah Pegawai		**4232**
persentase ASN yang memperoleh hukuman disiplin		**0,1**

- Pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya

Bentuk pemberian perhatian Pemerintah Kota Gorontalo terhadap ASN yang memiliki loyalitas, kinerja dan prestasi yang baik diwujudkan dengan pemberian berbagai penghargaan, salah satunya adalah dengan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Negara terhadap PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai yang lainnya. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
b. Satyalancana Karya Satya berwarna perak, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
c. Satyalancana Karya Satya berwarna perunggu, diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Berikut data Pemberian Penghargaan Satya Lencana dari Tahun 2022 sampai dengan 2024

Tabel 2.9

Pemberian Penghargaan Satya Lencana dari Tahun 2022 sampai dengan 2024

No	Masa Kerja	Jumlah				Total
		s/d 2021	2022	2023	2024	
I	30 Tahun	422	13	70	32	537
II	20 Tahun	614	30	32	48	724
III	10 Tahun	1006	70	11	209	1296
Jumlah		2042	115	113	289	2557

Terhadap hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024, Terdapat hambatan dan pendorong dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN, Faktor Penghambat pencapaian IP ASN antara lain :

- Belum ditetapkan Rencana Pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN yang didukung oleh anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
- Belum adanya Beasiswa bagi PNS untuk Peningkatan Kualifikasi Melalui Jalur Pendidikan Formal
- Masih adanya ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan secara mandiri belum sesuai ketentuan dalam hal pengurusan tugas belajar
- Belum maksimalnya implementasi penerapan Perwako terkait Pengembangan Kompetensi Pola Satu Pintu
- Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan dari Atasan terhadap Disiplin Pegawai Dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah

Untuk itu, beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
- Melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya pengurusan tugas belajar sebelum melaksanakan pendidikan lanjutan

- Memaksimalkan implementasi Perwako dalam pengembangan kompetensi aparatur pada setiap organisasi perangkat daerah
- Evaluasi dan Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Disiplin Di setiap Organisasi Perangkat Daerah
- Mendorong Kesadaran PNS dalam Meningkatkan Kualitas dan Kualifikasi Melalui Pendidikan Lanjutan

2. **Indeks Kepuasan terhadap layanan administrasi kepegawaian berbasis IT**

Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan bentuk upaya perbaikan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melaksanakan survey kepuasan masyakat khusus pelayanan administrasi kepegawaian Tahun 2024.

Capaian realisasi Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran strategis

Sasaran Strategis 2				
Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan yang berkualitas Prima				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT	Persen	90	91.58	101.76

Capaian indikator kinerja ini adalah 101.76 % atau **sangat baik.** Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan di Kota Gorontalo dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian tahun 2024 yang diperoleh dari pengolahan kuesioner yang dibagikan kepada 200 responden, secara keseluruhan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dikategorikan **baik**, dengan nilai rata-rata unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi (3,99) adalah unsur **biaya/tarif** dikarenakan menurut responden yang telah disurvey semua pelayanan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

tidak dipungut biaya atau gratis, sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah (3,52) adalah unsur ***persyaratan***, hal ini penyebabnya adalah kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Berikut ini adalah data capaian unsur pelayanan serta analisis capaian :

Tabel 2.11

DATA CAPAIAN UNSUR PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,52
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,60
3	Waktu penyelesaian	3,56
4	Biaya/Tarif	3.99
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,59
6	Kompetensi Pelaksana	3,57
7	Perilaku Pelaksana	3,58
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,91
9	Sarana dan Prasarana	3,65
	Jumlah Nilai	3,66333
	Nilai IKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar 3,65222 x 25	**91.58**
	CAPAIAN KINERJA	101.76%

Sebagaimana terlihat pada data diatas, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan BKPP Kota Gorontalo sebesar 91.58% berada pada interval mutu "A" dengan kategori kinerja unit pelayanan "sangat baik".

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 melampaui target dari target kinerja dengan nilai indeks 90 dengan realisasi 91.58 atau capaian 101.76%. Hal ini disebabkan karena adanya upaya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melalui Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan Informasi Administrasi ASN dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian antara lain :

1. Layanan Pengurusan Kenaikan Pangkat
2. Layanan Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
3. Layanan Pengurusan Pensiun untuk PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun

4. Layanan Pengurusan Administrasi Kepegawaian Lainnya

Pada Tahun 2024 BKPP Kota Gorontalo telah memberikan layanan pengurusan administrasi kepegawaian dan diselesaikan tepat waktu seperti dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1.12
Data Layanan Pengurusan administrasi kepegawaian yang diselesaikan
Tahun 2024

Jenis Layanan	Usulan	Realisasi	Diselesaikan tepat waktu
Kenaikan Gaji Berkala	2017	1990	1990
Kenaikan Pangkat	1225	396	396
Pensiun Pegawai	147	147	147
Karis/Karsu	79	66	66

Meskipun telah melebihi target BKPP tetap melakukan upaya untuk perbaikan pelayanan kepegawaian secara keseluruhan antara lain :

1. Peningkatan produktivitas seluruh pegawai supaya dapat mengoptimalkan waktu pengerjaan di semua bidang layanan
2. Secara terus menerus mengembangkan system kepegawaian, sampai dengan tahun 2024 BKPP Kota Gorontalo telah mengembangkan SIMPEG Online sehingga memudahkan pengurusan admninistrasi kepegawaian oleh seluruh pegawai.

3. Nilai Evaluasi LKIP

Berdasarkan hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah yang tertuang dalam surat Inspektorat Kota Gorontalo Nomor: 04.e/LHE/P.KIN/INSP/2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2022. Pencapaian nilai evaluasi LKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melebihi target yang ditetapkan (nilai 85) dengan mendapatkan **Predikat Memuaskan** , dengan Nilai 85.20. dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.14

Bobot / Skala Penilaian Kinerja

No	Komponen	Bobot	Total Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27.60

2	Pengukuran Kinerja	30	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15	13.80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22.25
	Jumlah	**100**	**85.20**

Untuk penilaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024. Evaluasi kinerja dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen kinerja yang meliputi : Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Untuk penilaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025. Evaluasi kinerja dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen kinerja yang meliputi : Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dari penilaian LKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2023 terdapat rekomendasi yang harus dilakukan perubahan/perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :

1. *Aspek Perencanaan Kinerja*

   Dalam menyusun anggaran didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai

2. *Aspek Perencanaan Kinerja*

   - Pengumpulan data kinerja dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
   - Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi
   - Pengukuran kinerja dapat menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional (penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional masih berdasarkan hasil anjab)
   - Pengukuran kinerja dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi (refocusing organisasi baik struktural maupun fungsional masih berdasarkan hasil anjab dan ABK)

3. *Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKPP*

   - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)

     Untuk itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo akan memperbaiki dalam penyusunan Renstra, Renja dan LKIP sesuai dengan ketentuan, selain terhadap pencapaian indicator yang tertuang pada perjanjian kinerja baik itu indikator program maupun kegiatan yang belum mencapai target dan akan melakukan upaya perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan

dengan memprioritaskan program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran.

4. Presentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti

Penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK akan selalu dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah, untuk itu bagi OPD/unit kerja yang masih memiliki tunggakan penyelesaian tindaklanjut LHP BPK agar selalu berkomunikasi dengan Inspektorat.

Target kinerja berkenaan dengan indicator ini adalah seluruh temuan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti. Untuk BKPP hal ini sudah dilaksanakan seluruhnya atau 100%

Tabel TC. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	Tahun 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks profesionalitas ASN			65	65	78	78.3	77.65		78	78.3	
2	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian IT			90	91.65	91.67	91.75	91.58		891.67	91.75	
3	Nilai Evaluasi LKIP			80	83.35	83.50	83.70	83.15		83.35	83.70	
4	Presentase temuan Inspektorat yang ditindak lanjuti			80	80	80	80	80		80	80	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Tuntuntan visi keempat Walikota Gorontalo yakni Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur dituangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dalam sasaran startegisnya yakni meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur dan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dengan mengedepankan penanganan isu-isu yang berkembang serta permasalahan permasalahan dibidang kepegawaian dan Diklat. Capaian kinerja pelayanan BKPP sampai dengan tahun 2024 antara lain :

1. Indeks Profesional ASN capaian kinerja 96.7 %
2. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian IT Capaian Kinerja 107.42%

Dari 2 indikator kinerja diatas dua indikator masih masih perlu mendapat perhatian yaitu indikator 1 "Indeks Profesionalitas ASN" karena realisasinya masih belum mencapai target yang ditentukan. Pemerintah Kota Gorontalo yang tinggi terhadap peningkatan kompetensi aparatur akan menjadi salah satu pendorong dalam meningkatan capaian kinerja tersebut. Adapun beberapa isu penting dalam peningkatan kinerja BKPP antara lain :

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen talenta dalam mutasi dan promosi jabatan

  Manajemen Talenta bagi Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN menjadi pedoman bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam upaya akselerasi reformasi manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Manajemen Talenta selain menjadi pilar penting dari sistem merit, Manajemen Talenta bertujuan untuk mempersiapkan pegawai yang memiliki kompetensi terbaik untuk mengisi posisi maupun jabatan yang selaras dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, sehingga akan tercipta pelayanan publik yang optimal dan mendorong pencapaian strategis dari pembangunan daerah yang berpengaruh pada tren positif dalam proses pembangunan nasional.

  Namun dalam pelaksanaannya, Manajemen Talenta belum terlaksana dengan baik dalam proses kegiatan mutasi dan promosi jabatan di lingkup Pemerintahan Kota Gorontalo, hal ini dapat ditinjau dari posisi jabatan tertentu yang diisi oleh pegawai

yang memiliki kompetensi kurang sesuai dengan jabatannya. Patut disadari bahwa pelaksanaan Manajemen Talenta merupakan tahapan penting demi mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang optimal melalui pegawai yang memiliki kompetensi terbaik yang akan dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo, maka dari itu penerapan masih akan dipelajari dari BKD Provinsi Gorontalo yang sudah terlebih dahulu menerapkan Manajemen Talenta kepada pegawai yang ada di lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo

- Belum optimalnya Disiplin aparatur

  Belum optimalnya disiplin aparatur dapat dilihat pada kedisiplinan waktu dan kedisiplinan kerja, tingkat kehadiran pegawai, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing individu pegawai, kemampuan berinovasi masih rendah, dan penempatan aparatur yang belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, hal-hal tersebut berpengaruh pada tingkat kedisiplinan aparatur, yang dapat mempengaruhi produktivitas pegawai itu sendiri dan pegawai lain yang menggantikan pekerjaan pegawai yang kurang disiplin, serta berpengaruh pada penyelenggaran pemerintahan.

- Belum Optimalnya Pemetaan Kompetensi Pegawai.

  Dengan adanya undang-undang Aparatur Sipil Negara maka kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam tingkat kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dimiliki oleh masing masing pegawai agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara. Kompetensi bagi setiap individu harus terus ditingkatkan pencapaiannya baik melalui pendidikan formal, kursus maupun pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan pola piker menuju kearah yang lebih baik. Untuk mempersiapkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara sempurna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, perlu adanya pemetaan kompetensi terhadap seluruh aparatur pemerintah Kota Gorontalo agar pengelolaan pemerintah terhadap pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tepat sasaran

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang

jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal SKPD, termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan rancangan awal SKPD disajikan dalam tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Gorontalo Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kInerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**6.060.568.513**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**6.060.568.513**	
I.1	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggan dan Evaluasi**	**100%**	**27.582.000**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggan dan Evaluasi**	**8 Dokumen**	**27.582.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangat Daerah	2 dokumen	10.426.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan	2 dokumen	10.426.300	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3.220.200	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3.220.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	8.386.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	8.386.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 Laporan	5.549.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 Laporan	5.549.500	
I.2	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**5.163.689.093**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**5.163.689.093**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang	5.087.420.493	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang	5.087.420.493	
	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 dokumen	72.328.600	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 dokumen	72.328.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.940.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.940.000,00	
I.3	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**21.044.600**	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**21.044.600**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	100 laporan	21.044.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	100 laporan	21.044.600	

I.4	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah'**	**100%**	**4.773.300**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah'**	**100%**	**4.773.300**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	4.773.300	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	4.773.300	
I.5	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**122.839.500**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**122.839.500**	
	Penyediaan Komponen Intalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	3.671.600	Penyediaan Komponen Intalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	3.671.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	13.005.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	13.005.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	12 paket	5.980.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	12 paket	5.980.100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	5.384.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	5.384.900	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	16.770.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	16.770.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 laporan	78.027.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 laporan	78.027.300	
I.6	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**7.812.000**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**7.812.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang Disediakan	3 Unit	7.812.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang Disediakan	3 Unit	7.812.000	
I.7	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**639.670.020**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**639.670.020**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	321.418.770	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	321.418.770	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	316.251.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	316.251.250	
I.8	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**100%**	**73.158.000**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**100%**	**73.158.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	3 unit	45.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	3 unit	45.420.000	

	Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	24.978.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	24.978.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	11 unit	2.760.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	11 unit	2.760.000	
II	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Jabatan yang Terisi Sesuai Kebutuhan organisasi**	**46%**	**545.008.100**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian**	**46%**	**545.008.100**	
		Persentase Penyelesaian Administrasi kepegawaian tepat waktu	**85%**			**Persentase Penyelesaian Administrasi kepegawaian tepat waktu**	**85%**		
		Persentase ASN yang memperoleh peningkatan Kualifikasi pendidikan	**90%**			**Persentase ASN yang memperoleh peningkatan Kualifikasi pendidikan**	**90%**		
		Persentase ASN Berkinerja Baik berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja	**98%**			**Persentase ASN Berkinerja Baik berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja**	**98%**		
II.1	**PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN**	**Persentase formasi CASN yang terisi**	**84%**	**175.796.900**	**PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN**	**Persentase formasi CASN yang terisi**	**84%**	**175.796.900**	
		Persentase layanan pensiun tepat waktu	**89%**			**Persentase layanan pensiun tepat waktu**	**89%**		
		Persentase data kepegawaian yang dikelola	**100%**			**Persentase data kepegawaian yang dikelola**	**100%**		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 dokumen	57.798.500	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 dokumen	57.798.500	
	Koordinasi Pelaksanan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	4 dokumen	17.530.400,00	Koordinasi Pelaksanan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	4 dokumen	17.530.400,00	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	17.431.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	17.431.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawwaian	4 dokumen	57.650.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawwaian	4 dokumen	57.650.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	4 dokumen	25.387.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	4 dokumen	25.387.000	
II.2	**MUTASI DAN PROMOSI ASN**	**Persentase ASN yang Dimutasi/Promosi Sesuai Kompetensi Jabatan**	**100%**	**221.655.600**	**MUTASI DAN PROMOSI ASN**	**Persentase ASN yang Dimutasi/Promosi Sesuai Kompetensi Jabatan**	**100%**	**221.655.600**	

		Jumlah ASN yang meperoleh SK kenaikan pangkat	**405**			**Jumlah ASN yang meperoleh SK kenaikan pangkat**	**410**		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 dokumen	140.799.100	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 dokumen	140.799.100	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6 dokumen	19.818.600	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6 dokumen	19.818.600	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hsil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen	61.037.900	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hsil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen	61.037.900	
II.3	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang mendapatkan fasilitas Pendidikan Tinggi dan Menengah**	**100%**	**59.206.100**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang mendapatkan fasilitas Pendidikan Tinggi dan Menengah**	**100%**	**59.206.100**	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	250 ASN	59.206.100	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Peningkatan Kapasitas	250 ASN	59.206.100	
II.4	**PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR**	**Frekuensi pelaksanaan evaluasi kinerja ASN secara berkala**	**100%**	**88.349.500**	**PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR**	**Frekuensi pelaksanaan evaluasi kinerja ASN secara berkala**	**100%**	**88.349.500**	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 dokumen	61.685.800	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 dokumen	61.685.800	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan pengelolaan Penyelesaian Disiplin ASN	5 laporan	26.663.700	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan pengelolaan Penyelesaian Disiplin ASN	5 laporan	26.663.700	
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN Yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**80%**	**99.859.600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi**	**80%**	**99.859.600**	
III.1	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**100%**	**99.859.600**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural**	**100%**	**99.859.600**	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporaan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	3 laporan	99.859.600	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporaan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	3 laporan	99.859.600	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Indikator kInerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**6.860.899.295**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**6.860.899.295**		
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggan dan Evaluasi**	**8 Dokumen**	**29.069.900**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggan dan Evaluasi**	**8 Dokumen**	**29.069.900**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan Perangat Daerah	2 dokumen	12.069.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan	2 dokumen	12.069.900		
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	2.750.000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	2.750.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	10.500.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 Laporan	3.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 Laporan	3.750.000		
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**5.648.023.753**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**5.648.023.753**		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/ bulan	5.601.109.753	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/ bulan	5.601.109.753		
	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 dokumen	43.229.000	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 dokumen	43.229.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.685.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.685.000,00		
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	**Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**7.970.000**	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**7.970.000**		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	7.970.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	7.970.000		
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah'**	**100%**	**3.070.000**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah'**	**100%**	**3.070.000**		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	3.070.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	3.070.000		
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Jumlah Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**330.157.268**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**330.157.268**		
	Penyediaan Komponen Intalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	1.999.200	Penyediaan Komponen Intalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	1.999.200		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	19.919.540	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	19.919.540		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	12 paket	41.313.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	12 paket	41.313.900		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	9.875.778	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	9.875.778		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	41.079.900	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	41.079.900		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	215.968.950	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	215.968.950		
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**157.434.418**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**157.434.418**		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	12.428.962	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	12.428.962		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang Disediakan	7 Unit	145.005.456	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang Disediakan	7 Unit	145.005.456		
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**615.887.956**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**615.887.956**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	360.455.456	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	360.455.456		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	253.432.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	253.432.500		
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**100%**	**69.286.000**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**100%**	**69.286.000**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	45.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	45.420.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	9.936.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	9.936.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12 unit	13.930.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12 unit	13.930.000		

	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian**	**90%**	**996.365.400**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian**	**90%**	**996.365.400**		
	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	**Jumlah Pengadaan ASN**	**90%**	**196.427.100**	**PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN**	**Jumlah Pengadaan ASN**	**90%**	**196.427.100**		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	86.929.700	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	86.929.700		
	Koordinasi Pelaksanan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	100 dokumen	14.110.300,00	Koordinasi Pelaksanan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	100 dokumen	14.110.300,00		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	20.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	20.000.000		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawwaian	12 dokumen	52.650.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawwaian	12 dokumen	52.650.000		
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	12 dokumen	22.737.100	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	12 dokumen	22.737.100		
	MUTASI DAN PROMOSI ASN	**Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi**	**100%**	**560.160.400**	**MUTASI DAN PROMOSI ASN**	**Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi**	**100%**	**560.160.400**		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	2 dokumen	489.539.400	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	2 dokumen	489.539.400		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1750 dokumen	19.297.800	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1750 dokumen	19.297.800		
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hsil pengelolaan promosi ASN	12 dokumen	51.323.200	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hsil pengelolaan promosi ASN	12 dokumen	51.323.200		
	Pengembangan Kompetensi ASN	**Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi**	**100%**	**49.066.600**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi**	**100%**	**49.066.600**		
			300 ASN	49.066.600			300 ASN	49.066.600		

	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Peningkatan Kapasitas				
	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	**Persentase Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatus**	**100%**	**190.711.300**	**PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR**	**Persentase Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatus**	**100%**	**190.711.300**		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 dokumen	168.500.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 dokumen	168.500.000		
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan pengelolaan Penyelesaian Disiplin ASN	1 laporan	22.211.300	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan pengelolaan Penyelesaian Disiplin ASN	1 laporan	22.211.300		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi**	**80%**	**349.051.025**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi**	**80%**	**349.051.025**		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural**	**100%**	**349.051.025**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural**	**100%**	**349.051.025**		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporaan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	0 laporan	349.051.025	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporaan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	0 laporan	349.051.025		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2025 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasioal, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagaiberikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif operasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya AlamuntukMeningkatkanNilai Tambahdi DalamNegeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan yang memiliki kewajiban/tugas Membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah menyusun Renstra Tahun 2025 – 2029 berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dengan merumuskan tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN dengan sasaran :
  1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
  2. Meningkatnya Kualitas layanan Administrasi Kepegawaian
  3. Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas

  Sasaran tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja yang untuk tahun 2026 seperti tersebut sebagai berikut :

Tabel

Sasaran, Indikator dan Target

BKPP Kota Gorontalo

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	78
2	Meningkatnya Kualitas layanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	91.67
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas	Nilai AKIP	83.30

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2025 didasarkan pada faktor pertimbangan logis dan strategis dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Gorontalo, implementasi reformasi birokrasi, perbaikan sistem manajemen kepegawaian, perbaikan pelayanan kepegawaian, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/418/Keuda Tahun 2020 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, antara program dan kegiatan tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo tahun 2025 memiliki 3 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 2 bidang dan 1 sekretariat.. Program dan kegiatan tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Jabatan yang Terisi Sesuai Kebutuhan organisasi**	**Persen**		**46%**	**545.008.100**	PAD		**48%**	**1.843.851.947**
		Persentase Penyelesaian Administrasi kepegawaian tepat waktu			**20%**				**25%**	
		Persentase ASN yang memperoleh peningkatan Kualifikasi pendidikan			**90%**				**90%**	
		Persentase ASN Berkinerja Baik berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja			**98%**				**98,2%**	
5.03.02.01	**Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase formasi CASN yang terisi**	**Persen**		**84%**	**175.796.900**			**86%**	**677.464.200**
		Persentase layanan pensiun tepat waktu	**Persen**		**89%**				**91%**	
		Persentase data kepegawaian yang dikelola	**Persen**		**100%**				**100%**	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		2	57.798.500	PAD		2	255.415.450
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		4	17.530.400	PAD		4	39.670.000
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN Yang Difasilitasi	Lembaga		1	17.431.000	PAD		1	250.000.000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		4	57.650.000	PAD		4	102.961.250
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Data Kepegawaian	Dokumen		4	25.387.000	PAD		4	29.417.500

5.03.02.2.02	**Mutasi Dan Promosi ASN**	**Persentase ASN yang Dimutasi/Promosi Sesuai Kompetensi Jabatan**	**Persen**		**100%**	**221.655.600**	PAD		**100%**	**568.437.098**
		Jumlah ASN yang meperoleh SK kenaikan pangkat	**ASN**		**405**				**410**	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaann Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen		4	140.799.100	PAD		4	405.025.848
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen		6	19.818.600	PAD		6	100.961.250
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		4	61.037.900	PAD		4	62.450.000
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang mendapatkan fasilitas Pendidikan Tinggi dan Menengah**			**100%**	**59.206.100**	PAD		**100%**	**200.000.000**
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN Yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		300	59.206.100	PAD		300	200.000.000
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Frekuensi pelaksanaan evaluasi kinerja ASN secara berkala**	**Persen**		**100%**	**88.349.500**	PAD		**100%**	**397.950.649**
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		12	61.685.800	PAD		12	220.000.000
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang Diberikan Penghargaan	Orang		18	0	PAD		18	0
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		5	26.663.700	PAD		5	177.950.649
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN Yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persen**		**80%**	**99.859.600**	PAD		**80%**	**576.327.376**
5.04.02.2.02	**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persen**		**100%**	**99.859.600**	PAD		**100%**	**576.327.376**
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		3	99.859.600	PAD		3	576.327.376
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**100%**	**6.060.568.513**	PAD		**100%**	**6.819.871.064**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja**	**Persen**		**100%**	**27.582.000**	PAD		**100%**	**88.731.300**

5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	10.426.300	PAD		3	25.625.000
5.03.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		2	3.220.200	PAD		2	11.225.000
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen							
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		12	8.386.000	PAD		2	27.767.000
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		3	5.549.500	PAD		3	24.114.300
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah**			**100%**	**5.163.689.093**			**100%**	**5.434.327.410**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		630	5.087.420.493	DAU		27	5.336.909.320
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	72.328.600	PAD		12	86.386.590
5.03.01.2.02.05	Koordinaasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	3.940.000	PAD		1	11.031.500
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Barang Milik Daerah**	**Persen**		**100%**	**21.044.600**	PAD		**100%**	**12.024.825**
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan		12	21.044.600	PAD		12	12.024.825
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**		**100%**	**4.773.300**	PAD		**100**	**4.870.700**
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		12	4.773.300	PAD		12	4.870.700
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Impelentasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		4	0	PAD		5	0
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum**	**Persen**		**100%**	**122.839.500**	PAD		**100%**	**420.270.075**
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12	3.671.600	PAD		12	4.766.275

5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket		12	13.005.600	PAD		12	46.815.350
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket		12	5.980.100	PAD		12	52.538.850
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Laporan		12	5.384.900	PAD		12	24.542.350
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12	16.770.000	PAD		12	52.982.250
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		22	78.027.300	PAD		24	238.625.000
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Sarana Dan Prasarana dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**		**100%**	**7.812.000**	PAD		**100%**	**77.860.000**
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Paket		7	0	PAD		7	0
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	unit		3	7.812.000	PAD		5	77.860.000
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**100%**	**639.670.020**	PAD		**100%**	**582.900.000**
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	2.000.000	PAD		12	2.000.000
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan		12	321.418.770	DAU		12	341.900.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantir Yang Disediakan	Laporan		12	316.251.250	DAU		12	239.000.000
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD Yang Dipelihara**	**Persen**		**100%**	**73.158.000**	PAD		**100%**	**198.886.754**
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		3	45.420.000	PAD		8	51.936.754
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung		1	24.978.000	PAD		1	133.000.000
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		11	2.760.000	PAD		11	13.950.000

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah 2025 – 2029 . Rencana Kerja ini memuat arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selama 1 (satu) tahun dan menjadi dasar perumusan kegiatan, output Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo adalah Program Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Adapun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dan Pendanaannya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan BKPP Kota Gorontalo Tahun 2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Komponen Intalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Koordinasi Pelaksanan Administrasi Pemberhentian	
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Pengelolaan Data Kepegawaian	
		MUTASI DAN PROMOSI ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun 2026 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026. Esensi dari semua program dan kegiatan ini adalah bahwa semua pihak atau para stakeholder yang memiliki peran dalam program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo diharapkan dapat mengamankan semua kebijakan yang ada dan dengan sungguh-sungguh dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing unit kerja.

Selain itu, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo merupakan dasar evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahunan BKPP Kota Gorontalo yang berarti bahwa setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dapat terlaksana apabila mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak dan tersedianya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo dibuat untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan pelayanan Kepegawaian dan Diklat di Kota Gorontalo.

Gorontalo, 29 Agustus 2025

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA GORONTALO

MOHAMMAD MULKY DATAU, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19830521 200112 1 004